BAB II

PERDAGANGAN DAN INVESTASI JEPANG DAN TIONGKOK DI INDONESIA

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan landasan konsep pada bab sebelumnya, bab ini akan berupaya menjelaskan lebih lanjut terkait perdagangan dan investasi Jepang dan Tiongkok di Indonesia. Pertama, penulis akan menjelaskan terkait perdagangan dan investasi Jepang dan Tiongkok secara umum. Hal ini meliputi kerjasama ekonomi dalam sektor perdagangan dan investasi Jepang dan Tiongkok di negara-negara Asia Tenggara. Kemudian, Penulis juga akan menjelaskan perdagangan dan investasi Jepang dan Tiongkok di Indonesia secara terpisah, seperti perdagangan dan investasi Jepang di Indonesia untuk mengetahui hubungan kerjasama Jepang dan Indonesia dalam bidang perdagangan maupun investasi dan untuk mengetahui posisi penting Indonesia bagi Jepang. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan perdagangan dan investasi Tiongkok di Indonesia yang bertujuan sama untuk mengetahui hubungan kerjasama Tiongkok dan Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi serta posisi penting Indonesia bagi Tiongkok. Pemaparan tersebut merupakan latar belakang sebagai landasan pengetahuan untuk memperkuat argumen pada bab selanjutnya.

2.1 Perdagangan dan Investasi Jepang dan Tiongkok

Perdagangan dan investasi merupakan suatu komponen penting bagi negara-negara industrialisasi seperti Jepang dan Tiongkok. Perdagangan internasional merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lainnya. Perdagangan biasanya meliputi barang dan jasa. Aktor-aktor dari perdagangan internasional tak

hanya dimainkan oleh aktor-aktor negara namun hal ini telah meluas hingga melibatkan aktor-aktor non-state. Dalam sistem perdagangan internasional perusahaan-perusahaan yang berasal dari suatu negara juga dapat melakukan kerjasama perdagangan dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Perdagangan merupakan suatu komponen penting dalam mendorong perekonomian suatu negara. Perdagangan internasional juga menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dibelahan dunia (cpssoft, 2019). Hal ini juga menimbang kebutuhan dalam beberapa komoditas yang tidak dimiliki suatu negara sehingga adanya perdagangan internasional sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder dari masyarakat internasional. Selain itu, dengan adanya perdagangan internasional dapat mempermudah kerjasama ekonomi suatu negara dalam membentuk kebijakan maupun sistem yang memudahkan transaksi perdagangan seperti adanya free trade area. Suatu perusahaan juga dapat dengan mudah mengembangkan produknya untuk memasuki pasar internasional.

Selain itu investasi biasanya merupakan salah satu komponen dalam kerjasama ekonomi suatu negara. Investasi merupakan kegiatan memberikan dana untuk mendapatkan aset yang diharapkan akan menghasilkan profit bagi suatu negara investor. Dalam sektor investasi, aktor-aktor didalamnya juga tak hanya aktor negara namun semakin berkembangnya kerjasama internasional aktor-aktor non-negara juga banyak berperan aktif dalam memberikan investasi pada suatu negara maupun entitas di suatu negara. Investasi juga merupakan suatu komponen yang penting dan menjadi salah satu faktor dalam mempertahankan eksistensi suatu aktor dalam mendapatkan posisi penting. Investasi dibagi menjadi dua yaitu investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Dalam konteks ini, Investasi langsung biasanya melalui properti seperti perusahaan yang dibangun dan berkolaborasi di suatu negara.

Sedangkan investasi tidak langsung biasanya suatu negara juga dapat berinvestasi melalui pinjaman dana yang memiliki bunga dalam obligasi yaitu surat pernyataan hutang maupun dalam bentuk saham (Stefii, 2019).

Jepang dan Tiongkok merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia maupun di dunia. Pada tahun 2018, Jepang menempati posisi ke lima dalam ekonomi terbesar di dunia dengan jumlah 5,6 triliun dolar (Amadeo, Japan's Economy, Abenomics, and Impact on U.S. Economy , 2019). Sedangkan pada tahun yang sama Tiongkok menempati posisi pertama dengan jumlah 25,3 triliun dolar (Amadeo, 2019). Dengan pencapaian tersebut, keduanya berhasil menduduki posisi lima besar dalam ekonomi terbesar di dunia. Kekuatan ekonomi Jepang dan Tiongkok merupakan hasil dari banyaknya industrialisasi pada kedua negara. Perusahaan industri banyak dijumpai di Jepang dan Tiongkok, tak jarang banyak tenaga asing yang dibutuhkan untuk memenuhi tenaga kerja dalam proses industri. Kedua negara juga cukup aktif dalam melakukan perdagangan melalui ekspor dalam berbagai komoditas. Komoditas ekspor terbesar dari jepang merupakan komponen dalam sektor otomotif dan ekspor terbesar dari Tiongkok merupakan sektor elektronik.

Jumlah industri yang besar di Jepang dan Tiongkok juga turut mendorong kontribusi perusahaan-perusahaan non-negara melakukan investasi ke berbagai belahan di dunia. Investasi perusahaan-perusahaan non-negara tentunya juga membawa nama negara untuk mempermudah proses kerjasama. Aktor negara dan non-negara saling berkaitan dalam kerjasama perdagangan, hal ini dapat ditinjau dari keterlibatan aktor negara dalam membuat kebijakan yang digunakan dalam implementasi hubungan kerjasama aktor non-negara. Sehingga, perdagangan yang dilakukan oleh aktor non-negara dibawah kebijakan suatu negara. Sebagai contoh adanya perjanjian kerjasama ekonomi yang biasanya juga memuat *free trade area*

didalamnya yang mendorong liberalisasi dalam pengurangan atau penghapusan tarif perdagangan merupakan kontribusi suatu negara untuk mendorong usaha-usaha dalam negeri. Sehingga kegiatan perdagangan yang dilakukan aktor non-negara memiliki hubungan erat dengan negara asalnya.

Asia Tenggara memiliki daya tarik tersendiri apabila ditinjau dari segi perekonomiannya, Asia Tenggara merupakan kawasan regional yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Dalam sektor perdagangan, Asia Tenggara merupakan kawasan regional yang cukup penting berperan dalam perdagangan internasional. Ditengah meningkatnya kebijakan proteksionisme yang dilakukan beberapa negara maupun kawasan regional, ASEAN melihat perdagangan sebagai peluang sehingga mendorong kawasan ini menjadi sangat optimis dengan perdagangan maupun aktivitas komersial. Selain itu, menurut data yang dilansir dari HSBC Global yang menyatakan bahwa ASEAN merupakan salah satu kawasan yang memiliki prospek perdagangan yang menjanjikan di dunia (Siregar, 2018). Selain itu, ASEAN merupakan pasar cukup besar ditambah populasi yang cukup besar dan lapangan kerja yang rendah juga mendorong Asia Tenggara sebagai tenaga kerja dengan upah rendah. Hal ini tentunya juga membuat Asia Tenggara menjadi salah satu tujuan investor asing.

Jepang dan Tiongkok merupakan dua negara yang menjadi mitra dagang utama terbesar di Asia Tenggara. Sebagai mitra dagang terbesar, keduanya memiliki perjanjian ekonomi untuk memperkuat kerjasama dengan kawasan regional ASEAN. Jepang memiliki hubungan kerjasama ekonomi melalui Japan-ASEAN economic partnership agreement. Perjanjian ini dilaksanakan pada desember 2008 yang terdiri dari perdagangan barang, jasa, dan kerjasama ekonomi laiinya (ASEAN I. i., 2020). Selain itu, Tiongkok juga memiliki perjanjian kerjasama ekonomi melalui ASEAN-

Tiongkok Free Trade Agreement. Perjanjian tersebut secara resmi ditandatangani beberapa negara Asia Tenggara pada November 2002. Perjanjian organisasi kawasan regional ASEAN dengan Tiongkok merupakan perjanjian kawasan dengan negara lain yang pertama. Perjanjian banyak melalui tahap revisi, hingga pada tahun 2015 telah dilakukan finalisasi terhadap penghapusan tarif pada negara-negara di ASEAN (ASEAN). Kedua perjanjian tersebut memperkuat kerjasama ekonomi Jepang dan Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini tentunya memudahkan hubungan ekonomi keduanya dalam sektor perdagangan.

Jepang dan Tiongkok bermain aktif dalam perdagangan di Asia Tenggara, kedudukan keduanya sebagai mitra dagang terbesar di Asia Tenggara tentunya memberikan dampak yang signifikan dalam perekonomian Asia Tenggara. Perdagangan Jepang di Asia Tenggara juga turut membawa dewan dalam Federation of Japanese Chamber of Commerce and Industri in ASEAN (FJCCIA). Dewan ini berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan Jepang di negara-negara ASEAN kecuali Brunei Darussalam (Haseba, 2019). Jepang banyak mengekspor produk-produk mesin dan mengimpor hasil pertanian, bahan-bahan mentah, dan lain-lain. Selain itu Tiongkok juga memiliki peran dalam perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Bagi ASEAN Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar dikawasan, sedangkan bagi Tiongkok ASEAN juga merupakan mitra dagang terbesar yang menduduki posisi ketiga (Xilian, China and ASEAN doing well on economic, trade cooperation, 2019). Bagi Tiongkok, perdagangan di kawasan Asia Tenggara juga cukup meningkat secara signifikan.

Investasi Jepang dan Tiongkok juga merupakan komponen penting dalam kerjasama ekonomi. Nilai investasi kedua negara tersebut terus meningkat tiap tahunnya. Pada awalnya kerjasama dan investasi hanya berlaku pada negara-negara

pendiri ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Kemudian meningkatnya investasi tersebut telah merambah negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain itu, investasi keduanya juga terlihat dalam ADB dan AIIB. Dimana diketahui bahwa saham terbesar dalam ADB dikuasai oleh Jepang sedangkan saham terbesar AIIB dikuasai oleh Tiongkok. Disamping itu, kerjasama ekonomi keduanya juga memuat terkait investasi Jepang dan Tiongkok di Asia Tenggara. Beberapa tahun belakangan, kedua negara mengalihkan kerjasama investasinya menjadi salah satu komponen dalam proyek yang bernama QII dan BRI. Investasi tersebut juga banyak di implementasi di negara-negara Asia Tenggara. Beberapa investasi dari kedua negara tersebut juga didorong oleh perusahaan-perusahaan dan aktor non-state.

Jepang dan Tiongkok merupakan negara investor terbesar bagi pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara. Status negara-negara Asia Tenggara sebagai negara berkembang tentunya mendorong ASEAN membutuhkan investor dalam pembangunan proyek infrastruktur. Negara-negara di Asia Tenggara beberapa tahun belakangan hingga kini banyak berfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur di negaranya. Investasi Jepang di Asia Tenggara cukup meningkat hingga pada tahun 2017 menurut data mencapai angka 22 milyar dolar yang diketahui berjumlah dua kali lipat dibandingkan pada tahun 2012 (Bloomberg, 2019). Pada tahun 2018 menurut data dari menteri perdagangan Tiongkok, nilai investasi di Tiongkok berjumlah 89,01 milyar di ASEAN (Xilian, 2019). Menurut data, pada tahun 2018 ADB telah menyiapkan untuk memberikan investasi sejumlah 25 juta dolar pada ASEAN guna mendorong kebutuhan usaha-usaha di Asia Tenggara (ADB, 2018). Pada September 2019, AIIB juga melakukan investasti dalam beberapa proyek di Asia Tenggara dengan jumlah investasi 1.09 milyar dolar (China, 2019). Kedua

bank tersebut memilliki peran dalam investasi pada proyek-proyek maupun industri di Asia Tenggara.

2.2 Perdagangan dan Investasi Jepang dan Tiongkok di Indonesia

Dalam pemaparan sebelumnya yang membahas terkait perdagangan dan investasi yang dilakukan Jepang dan Tiongkok di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara destinasi terbesar bagi perdagangan dan investasi. Perdagangan dan Investasi Jepang dan Tiongkok di Indonesia merupakan komponen penting dalam kerjasama bilateral masing-masing negara dengan Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat dari posisi Indonesia yang menjadikan Indonesia wilayah yang penting bagi keduanya. Indonesia merupakan negara dengan pasar terbesar yang terus meningkat di Asia Tengara. Dengan jumlah populasi yang cukup besar, Indonesia juga tercatat dalam jejeran negara dengan masyarakat paling konsumtif di dunia (Bank W. , 2019). Nilai pasar Indonesia meningkat dan menghasil menggeser posisi Singapura dengan nilai 529 miliar dolar, sehingga hal ini juga mendorong Indonesia menjadi salah satu negara pasar saham terbesar di Asia Tenggara. Ekonomi yang kuat menjadikan Indonesia memiliki peluang yang cukup besar hal ini disampaikan oleh wakil kepala investasi Amundi Asset Management yaitu Vincent Mortier (Miller & Nguyen, 2020). Selain itu, kebijakan Indonesia melalui TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) juga turut mengundang investor asing untuk melengkapi investasi dalam beberapa komponen penunjang industrialisasi dalam negeri (Kemenperin, 2018). Pemerintah Indonesia mendorong investor asing untuk turut berpartisipasi pada produk dalam negeri, tak terkecuali bagi Jepang dan Tiongkok sebagai negara dengan perekonomian dan industrialisasi terbesar serta investor terbesar di Indonesia.

Penandatanganan perjanjian perdamaian antara Jepang-Indonesia pada tahun 1958 sebagai tanda berakhirnya konflik kedua negara seiring dengan dimulai babak baru hubungan bilateral antara kedua negara (MOFA). Pergantian masa kepemimpinan Soekarno ke masa kepemimpinan Soeharto membuka jalan investasi asing untuk masuk ke Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang terpuruk. Pada masa tersebut, mulai diimplementasi undang-undang terkait penanaman modal asing sehingga hal ini mendorong pihak Jepang untuk mulai meningkatkan iklim investasi dan berbagai bantuan di Indonesia. Jepang menawarkan investasi yang bernilai cukup tinggi yaitu 467,7 juta dollar yang disampaikan pada forum IGGI *(Inter-Governmental Group on Indonesia)* yang dibentuk Indonesia untuk para investor asing melebihi nilai investasi yang diberikan oleh Amerika Serikat (Tempo, 2014). Sejak saat itu, investasi Jepang terus meningkat hingga pada tahun 1974, masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi yang mengangkat isu Jepang telah mendominasi perekonomian dan mematikan Industrialisasi dalam negeri. Demonstrasi tersebut ditujukan pada kepemimpinan Soeharto yang dirasa terlalu membuka aliran modal asing dalam negeri sehingga dilihat sebagai suatu ancaman bagi Indonesia.

Hubungan bilateral Indonesia dan Jepang yang telah berjalan selama ini mengalami banyak rintangan, namun hal ini tidak membuat kerjasama kedua negara ini menjadi *stagnan*. Peningkatan kerjasama kedua negara dapat ditandai dengan hubungan perdagangan kedua negara pada masa pemerintahan presiden ke-5 Indonesia yaitu Megawati Soekarnoputri. Pada saat itu, untuk memperkuat hubungan bilateral perdagangan dengan Indonesia, Jepang menawarkan *Free Trade Agreement* (FTA). Sebagaimana, untuk mengembangkan pasar perdagangan, maka penghapusan dan penurunan tarif pada perdagangan sangat diperlukan hal ini juga tercantum dalam

General Agreement on Tarrifs and Trade (Group, 2005). Beberapa komoditas yang masuk dalam pengurangan tarif dari Jepang diantaranya ialah elektronik, tekstil, otomotif, komponen kendaraan, dan lain-lain. Komoditas dari Indonesia yang termasuk didalamnya ialah minyak, batubara, tekstil, hasil tambang, dan lain-lain. Dalam memudahkan perdagangan kedua negara, pada tanggal 20 Agustus 2007 Jepang dan Indonesia membuat perjanjian yang disebut dengan *Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang bertujuan untuk meningkatkan liberalisasi perdagangan dan investasi kedua negara. Jepang merupakan negara yang menduduki posisi kedua pada tujuan ekspor terbesar dan menduduki posisi ketiga dalam sumber impor Indonesia (Trade, 2018). Sehingga dengan adanya IJEPA hal ini dapat membantu memudahkan kedua negara dalam melakukan transaksi perdagangan.

Selain sektor perdagangan, hubungan Indonesia dan Jepang juga dihadiri dengan investasi. Pada tahun 1960, Jepang menjadi salah satu anggota dari DAC (*Development Assistance Commite*) sehingga hal ini mendorong Jepang untuk bergabung dengan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Sesuai dengan misinya, OECD ialah organisasi yang turut mempromosikan dalam meningkatkan komitmen dalam mensejahterakan masyarakat internasional terutama dalam ekonomi dan sosial. Implementasi investasi Jepang di Indonesia dapat dilihat dari hadirnya ODA (*Official Development Assistance*). Terdapat dua bentuk investasi dari Jepang yaitu bantuan (grants) melalui JICA (*Japan International Cooperation Agency*) dan pinjaman (*loans*) melalui OECF (*Overseas Economic Cooperation Fund*). Perusahaan milik Jepang juga banyak didirikan, menurut duta besar Jepang di Indonesia, Masafumi Ishi menyatakan setidaknya terdapat 1500 perusahaan yang telah berdiri di Indonesia yang memiliki 93,3% pekerja lokal sehingga hal ini membantu masyarakat Indonesia untuk memperoleh

sumber mata pencaharian (Daily, 2018). Jepang juga membentuk *Quality Infrastructure Investment* (QII) pada tahun 2015 yang bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap proyek-proyek pembangunan seperti contoh pada pembangunan infrastruktur yang saat ini berfokus pada negara-negara di Asia tak terkecuali di Indonesia (Yoshino, Hendriyetti, & Lakhia, 2019). Investasi yang dilakukan Jepang merupakan salah satu strategi dari negeri sakura tersebut dalam membangun posisi kuatnya dalam perekonomian di Indonesia.

Sebagai contoh, kolaborasi pembuatan mobil listrik "proton" yang melibatkan perusahaan Suzuki yang berasal dari Jepang. Proyek pemerintah Indonesia yang memproduksi mobil listrik tersebut dinilai sebagai suatu peluang bagi Jepang. Terlebih, posisi Jepang yang masih menduduki mitra dagang terbesar dalam sektor otomotif. Indonesia memilih Jepang untuk bekerjasama dalam pembuatan mobil elektrik. Selain itu, investasi lainnya ialah proyek pembangunan jalur kereta yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Proyek tersebut merupakan salah satu proyek besar pemerintah Indonesia yang menghubungan daratan pulau jawa. Hal ini juga dinilai sebagai suatu peluang yang besar bagi Jepang, sehingga melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) menawarkan kolaborasi dalam proyek tersebut. Atas pertimbangan pemerintah Indonesia, maka proyek tersebut berhasil diberikan oleh Jepang. Sehingga proyek pembangunan jalur kereta terbesar Jakarta-Surabaya resmi melibatkan perusahaan milik Jepang didalamnya.

Hubungan kerjasama pemerintah Jepang dan Indonesia juga mengalami pasang surut, hal ini dapat dilihat dari peristiwa yang dialami Indonesia pada tahun 1974 yang berdampak pada hubungan kerjasama kedua negara. Demonstrasi yang terjadi di Indonesia atas pandangan negatif masyarakat terhadap investasi asing yang dinilai mendominasi perekonomian Indonesia tentunya memiliki pengaruh penurunan

investasi Jepang. Selain itu, akibat krisis ekonomi pada tahun 1997, hal ini juga berdampak pada menurunnya investasi dari pemerintah Jepang ke Indonesia. Namun polemik hubungan kedua negara tersebut tak bertahan lama, hingga kini pada tahun 2019 menurut BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Jepang menjadi salah satu negara yang menduduki posisi tertinggi dalam jumlah investasi di Indonesia yang bernilai 900 juta dollar (Putri, 2019). Selain itu, dalam sektor perdagangan Jepang juga masih menduduki posisi kedua dalam mitra dagang terbesar Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (Kusnandar, 2019).

Dinamika hubungan antara Jepang dan Indonesia yang telah berjalan juga didukung dengan posisi penting Indonesia bagi Jepang. Sebagai salah satu *energy supplier*, Indonesia berkontribusi penting menjadi salah satu pendukung kemajuan industrialisasi di Jepang. Bahan-bahan mentah seperti batu bara, minyak, gas alam, dan lain lain merupakan komponen penting dalam proses industrialisasi sehingga mendukung perdagangan Jepang (Jepang). Selain itu, jumlah tenaga kerja Indonesia juga menjadi salah satu faktor pendorong posisi penting Indonesia bagi Jepang. Hal ini dapat terlihat dari kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang, sejumlah 345.150 tenaga kerja Indonesia dibutuhkan mengingat Jepang sebagai salah satu negara industrialisasi terbesar (Hikam, 2019). Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN dan memiliki kedudukan penting sebagai salah satu negara dengan GDP terbesar juga menjadi salah satu jalan bagi Jepang untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Posisi strategis Indonesia juga memiliki kedudukan yang penting bagi perdagangan Jepang dengan negara lain terutama impor minyak dari Timur Tengah (Logaraj, 1978).

Hubungan bilateral resmi antara Tiongkok dan Indonesia dimulai pada tahun 1950, sejak saat itu Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui Beijing

sebagai Ibu kota Tiongkok hal ini bertolak belakang dengan negara-negara barat yang masih memperdebatkan Taiwan sebagai ibu kota (Anwar, 2019). Pada masa kepemimpinan presiden Soekarno, hubungan kedua negara sempat menemui hambatan proses masuknya investasi asing belum berjalan baik hal ini dapat dilihat dari bentuk sentimen Soekarno terhadap investasi asing yang ditakutkan akan mendominasi. Selain itu, menimbang beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia terkait sentimen terhadap anti-Tiongkok hingga pada masa kepemimpinan presiden Soeharto, hubungan bilateral kedua negara tidak berjalan secara signifikan (Anwar, 2019). Hingga pada Oktober 2013, kedua negara berkomitmen dalam membangun hubungan *Comprehensive Strategic Partnership*. Hubungan kerjasama tersebut mendorong peningkatan kerjasama kedua negara terutama dalam sektor ekonomi.

Hubungan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia dalam bidang perdagangan diperkuat dengan dibentuknya *ASEAN-Tiongkok Free Trade Agreement* (ACFTA). Hal ini bertujuan untuk memudahkan negara-negara di ASEAN dalam memiliki hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Melalui perwakilan-perwakilan negara pada tanggal 6 November 2001 seluruh anggota ASEAN menandatangani ACFTA sebagai komitmen dalam menciptakan pasar bebas dan mengurangi hambatan dalam melakukan kerjasama perdagangan. Perjanjian tersebut juga telah melalui beberapa perubahan pada framework hingga pada tahun 2004, Indonesia secara resmi meratifikasi *Ratifikasi Framework Agreement ASEAN-Tiongkok FTA* melalui putusan presiden no 48 tahun 2004 (Kemendag, 2018). Beberapa komoditas impor dan ekspor Indonesia dan Tiongkok sebagai contoh seperti batu bara, kelapa sawit, biji tembaga, besi, nikel, dan lain-lain. Hadirnya ACFTA memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan perdagangan kedua negara. Pada tahun 2005, ASEAN dan Tiongkok mulai mengimplementasikan *Early Harvest Program* (EHP) yang

merupakan salah satu framework dari perjanjian perdagangan bebas. Hal ini berdampak pada perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia yang terus meningkat secara signifikan pada tahun 2006 hingga 2010 (Chandra & Lontoh, 2011). Indonesia juga merupakan salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang menjalin kerjasama resmi dengan pemerintah Tiongkok (Hong, 2015).

Kerjasama bilateral dalam sektor ekonomi kedua negara juga diperkuat dengan adanya investasi. Sebagai salah satu langkah Tiongkok dalam integrasi ekonom internasional, hal ini mendorong pemerintah Tiongkok dalam menawarkan beberapa bantuan dan pinjaman dalam bentuk investasi. Sejak tahun 2008, Tiongkok terdaftar sebagai salah satu negara investor terbesar bagi Indonesia. Pemerintah Tiongkok juga memfokuskan investasinya terutama pada negara-negara di Asia Tenggara tak terkecuali Indonesia. Investasi Tiongkok yang diberikan Indonesia melalui beberapa entitas diantaranya swasta, badan milik pemerintah pusat, dan badan milik pemerintah daerah (Gammeltoft & Tarmidi, 2011). Pada tahun 2013, pemerintah Tiongkok secara resmi membentuk Belt and Road Initiatives (BRI) yaitu proyek pembangunan Tiongkok yang salah satunya berfokus pada investasi proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah Indonesia yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas. Hingga pada April 2019, Indonesia telah menandatangani beberapa MoU (*Memorandum of Understanding*) yang juga dihadiri oleh beberapa pebisnis yang berasal dari kedua negara di Beijing. (Sebayang, 2019).

Contoh dari proyek investasi Tiongkok di Indonesia yaitu pembangunan jalur kereta Bandung-Jakarta. Fokus pemerintah Indonesia saat ini mengarah pada pembangunan infrastruktur khususnya pada pembangunan jalur kereta api. Sehingga hal ini mendorong Tiongkok yang melihat proyek tersebut sebagai suatu peluang.

Melalui Tiongkok Railway Construction Corporation (CRCC), salah satu perusahaan yang berasal dari Tiongkok tersebut menawarkan pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam proyek pembangunan jalur kereta Bandung-Jakarta. Atas pertimbangan pemerintah Indonesia menyetujui untuk melibatkan Tiongkok dalam proyek yang menghubungkan ibu kota jawa barat dan Jakarta.

Dinamika hubungan antara Tiongkok dan Indonesia dalam masa lalu juga mengalami banyak pasang surut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peristiwa yang membawa isu anti-Tiongkok yang terjadi dimasa lalu. Tentunya hal ini sempat membatasi hubungan antara kedua negara. Tiongkok juga sempat mendapat pandangan buruk terhadap isu dukungan Tiongkok terhadap pasukan PKI (Partai Komunis Indonesia) sehingga isu-isu tersebut yang menjadi faktor menurunnya kredibilitas hubungan kedua negara. Namun tak dapat dipungkiri kini pengaruh Tiongkok mulai menguat di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari eksistensi Tiongkok dalam menggarap beberapa proyek yang ada di Indonesia. Selain itu dalam data yang diperoleh dari BPS, Tiongkok merupakan salah satu mitra perdagangan terbesar Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah perdagangan kedua negara mencapai 72,66 milyar dollar dan menggeser posisi beberapa negara yang sebelumnya menjadi mitra dagang terbesar di Indonesia (Widowati, 2019). Selain itu, dalam bidang investasi, Tiongkok juga menjadi salah satu negara investor terbesar di Indonesia.

Kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara yang penting bagi Tiongkok menjadi salah satu faktor meningkatnya iklim kerjasama kedua negara terutama dalam perdagangan maupun investasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh kuat di ASEAN dinilai dapat menduduki posisi *"natural leader"* di kawasan. Indonesia juga turut menjadi negara yang aktif dalam ASEAN sehingga hal ini berpeluang bagi Tiongkok untuk turut menyebarkan pengaruhnya di Asia

Tenggara (Heuvel, 2018). Selain itu, Indonesia juga dilihat sebagai negara yang memiliki minat tenaga kerja luar negeri yang cukup tinggi, hal ini sangat membantu industrialisasi di Tiongkok dengan upah yang jumlahnya lebih rendah. Kekayaan sumber daya alam Indonesia juga berkontribusi dalam komoditas impor yang penting bagi Tiongkok sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Tiongkok. Jumlah populasi yang besar di Indonesia juga menjadi daya Tarik tersendiri bagi perdagangan Tiongkok mengingat jumlah masyarakat konsumtif di Indonesia yang relatif tinggi sehingga berpotensi menjadi pasar besar Tiongkok. Posisi Indonesia juga disebut sebagai salah satu wilayah yang paling penting bagi kelangsungan proyek BRI Tiongkok.